



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

**PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Menetapkan : **PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.****

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;

4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
5. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 327) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.



Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 18 Juli 2016



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

VISI :

SUMENEP MAKIN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG MANDIRI, AGAMIS, NASIONALIS, TRANSPARAN, ADIL DAN PROFESIONAL

- MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
 TUJUAN 1.1. : Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Dan Perluasan Akses Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I Kesehatan = Angka Harapan Hidup (Umur panjang dan hidup sehat) - I Pendidikan = Angka Harapan Lama Sekolah (Pengetahuan) - I Pengeluaran = lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (Standar hidup layak)

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.1.1. Meningkatkan Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	1.1.1.1. Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan = 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks rata-rata lama sekolah)	Dinas Pendidikan
	1.1.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	$\frac{(\Sigma \text{ Lama Pendidikan X Siswa setiap jenjang})}{\Sigma \text{ Penduduk Usia Sekolah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	1.1.1.3. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	$\frac{\sum penduduk(usia diatas 15 th) yang bisa menulis pada tahun t}{\sum penduduk usia 15 th keatas} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
	1.1.1.4. Persentase jumlah sekolah terakreditasi:		Dinas Pendidikan
	- Prosentase SD/MI Terakreditasi	$\frac{\sum sekolahSD/MIterakreditasi}{\sum Sekolah} \times 100\%$	
	- Prosentase SMP/MTS Terakreditasi	$\frac{\sum sekolahSMP/MTSterakreditasi}{\sum Sekolah} \times 100\%$	
	- Prosentase SMA/SMK/MA Terakreditasi	$\frac{\sum sekolahSMA/SMK/MATERakreditasi}{\sum Sekolah} \times 100\%$	
1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar	1.1.2.1. Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
	1.1.2.2. IKM layanan perpustakaan	SKM = Total dari Nilai Persepsi $\frac{\text{Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ Dimana: Nilai penimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{9} = 0,11$	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
1.1.3. Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	1.1.3.1. Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Dinas Kesehatan
	1.1.3.2. Persentase Individu/Jiwa yang memiliki asuransi kesehatan (JKN)	$\frac{\sum Penduduk yang dijamin JKN}{\sum Penduduk} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
	1.1.3.3. Persentase jumlah puskesmas terakreditasi	$\frac{\sum Puskesmas yang lulus penilaian akreditasi}{\sum Puskesmas} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
1.1.4. Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.1.4.1. Rasio KB Aktif	$\frac{\sum akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun}{\sum pasangan usia subur pada tahun yang sama} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana
	1.1.4.2. Persentase Angka pertumbuhan penduduk	Data Bapedda	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana

TUJUAN 1.2. : Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p>Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka</p> $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.2.1. Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	1.2.1.1. Persentase partisipasi angkatan kerja	$\frac{\sum \text{pekerja usia angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk usia angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	1.2.1.2. Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	$\frac{(\sum \text{kasus Perselisihan HI thn (n) - thn (n - 1)})}{(\text{Perkara Perselisihan HI thn (n - 1)})} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	1.2.1.3. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	1.2.1.4. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	$\frac{\sum \text{pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan}}{\sum \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.2.2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.2.2.1. Jumlah PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Keluarga per tahun berkenaan	Dinas Sosial
	1.2.2.2. Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	$\frac{\sum \text{PMKS yang diberdayakan tahun berkenaan}}{\sum \text{PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
1.2.3. Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	1.2.3.1. Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	$\frac{\sum \text{Kasus Dalam Rumah Tangga}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana
	1.2.3.2. Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	$\frac{\sum \text{Kasus Yang terselesaikan}}{\sum \text{Kasus (Pengaduan)}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p>Persentase Angka Kemiskinan</p> <p>$GK = GKM + GKNM$</p> <p>Dimana :</p> <p>GK = Garis Kemiskinan</p> <p>GKM = Garis Kemiskinan Makanan</p> <p>GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan</p>

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.2.4. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.2.4.1. Jumlah PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Keluarga per tahun berkenaan	Dinas Sosial
	1.2.4.2. Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	$\frac{\sum \text{PMKS yang diberdayakan tahun berkenaan}}{\sum \text{PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
1.2.5. Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	1.2.5.1. Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	$\frac{\sum \text{Kasus Dalam Rumah Tangga}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana
	1.2.5.2. Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	$\frac{\sum \text{Kasus Yang terselesaikan}}{\sum \text{Kasus (Pengaduan)}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana

- MISI 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN
- TUJUAN 2.1. : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai Bentuk Upaya Menurunkan Disparitas Ketersediaan Infrastruktur Antar Wilayah

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p>Indeks GINI (GINI Ratio)</p> <p>$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. • Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. <p>Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.</p> <p>Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.</p> <p>Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.</p>

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
2.1.1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	2.1.1.1. Persentase infrastruktur dalam kondisi baik:		
	<i>Daratan :</i>		
	- Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{panjang jalan yang kondisinya baik, tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jalan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dinas PU. Bina Marga
	- Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	$\frac{\sum \text{jembatan yang kondisi baik tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jembatan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dinas PU. Bina Marga
	- Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	Luas daerah irigasi yang sudah dapat diairi dengan irigasi teknis, tahun berkenaan	Dinas PU. Pengairan
	- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi yang sudah ada}}{\text{Panjang jaringan irigasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Dinas PU. Pengairan
	<i>Kepulauan:</i>		
	- Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	$\frac{\sum \text{panjang jalan yang kondisinya baik, tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jalan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dinas PU. Bina Marga
	- Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	$\frac{\sum \text{jembatan yang kondisi baik tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jembatan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	Dinas PU. Bina Marga
	- Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	Luas daerah irigasi yang sudah dapat diairi dengan irigasi teknis, tahun berkenaan	Dinas PU. Pengairan
- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi yang sudah ada}}{\text{Panjang jaringan irigasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Dinas PU. Pengairan	
2.1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	2.1.2.1. Persentase korban kecelakaan lalu lintas	$\frac{\sum \text{Lakalantas pada Th. N}}{\sum \text{kendaraan pada Th. N}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	2.1.2.2. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	$\frac{\Sigma \text{angkutan umum yg lulus uji pada Th. N}}{\Sigma \text{angkutan umum wajib uji pada Th. N}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
2.1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	2.1.3.1. Indeks Kota Layak Huni :		
	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\Sigma \text{rumah tinggal bersanitasi}}{\Sigma \text{rumah tinggal}} \times 100\%$	Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang
	- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	$\frac{\Sigma \text{rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih}}{\Sigma \text{rumah tinggal}} \times 100\%$	Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang
	- Persentase rumah layak huni	$\frac{\Sigma \text{rumah tinggal layak huni}}{\Sigma \text{rumah tinggal}} \times 100\%$	Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang
	- Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\Sigma \text{lingkungan pemukiman kumuh yang ditangani}}{\Sigma \text{lingkungan pemukiman kumuh}} \times 100\%$	Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang
	- Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)	$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang Terlayani Sampah 3 kecamatan}}{\text{Jumlah Penduduk di 3 Kec.}} \times 100\%$	Kantor Kebersihan Dan Pertamanan
	2.1.3.2. Persentase tersedianya luasan RTH public	$\frac{\Sigma \text{luasan RTH Publik yang tersedia diwilayah kota kawasan perkotaan}}{\Sigma \text{luasan RTH publik yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang

TUJUAN 2.2. : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p align="center">Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p align="center">IKLH Kabupaten = (30%) IPA + (30%) ISPU + (40%) ITH</p> <p>dimana:</p> <p>1. IKLH_Kabupaten = indeks kualitas lingkungan tingkat Kabupaten Sumenep</p> <p>2. IPA = indeks pencemaran air sungai</p>

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

3. ISPU = indeks standar pencemar udara
 4. ITH = indeks tutupan hutan

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
2.2.1. Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan	2.2.1.1. Indeks kualitas air sungai	$P_{ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <ol style="list-style-type: none"> 1. $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} 2. $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij} Evaluasi terhadap P_{ij} adalah sebagai berikut: 3. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq P_{ij} \leq 1,0$ 4. Tercemar ringan jika $1,0 < P_{ij} \leq 5,0$ 5. Tercemar sedang jika $5,0 < P_{ij} \leq 10,0$ 6. Tercemar berat jika $P_{ij} > 10,0$ 	Badan Lingkungan Hidup
	2.2.1.2. Indeks kualitas udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Udara IKLH = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ 2. I_{eu} = rata rata (SO_2 hasil pemantauan dibagi SO_2 Ref EU, dan NO_2 hasil pemantaun dibagi NO_2 Ref EU) 	Badan Lingkungan Hidup
	2.2.1.3. Indeks Tutupan Lahan	$ITV = 100 - (84,3 - (TV \times 100)) \times (50/54,3)$ $TV = \frac{LTV}{L \cdot W}$ <p>ITV = indeks Tutupan vegetasi/lahan TV = Tutupan Vegetasi LW = Luas Wilayah</p>	Badan Lingkungan Hidup
	2.2.1.4. Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)	Pertambahan Jumlah industri yang mempunyai Dokumen Lingkungan = Jumlah Industri yang mempunyai dokumen lingkungan tahun sebelumnya + Jumlah Industri yang mempunyai dokumen lingkungan pada tahun berjalan	Badan Lingkungan Hidup

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
2.2.2. Meningkatnya Kualitas SDA Dan Lingkungan Hidup	2.2.2.1. Rasio elektrifikasi	$\frac{\Sigma \text{ KK atau rumah yang mendapat pemenuhan energi listrik}}{\Sigma \text{ seluruh KK atau rumah se kab. Sumenep}} \times 100\%$	Kantor Energi Dan Sumber Daya Mineral
	2.2.2.2. Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	$\frac{\text{Anggaran tahun dasar pemanfaatan energi terbarukan}}{\Sigma \text{ untuk pemenuhan jaringan listrik}} \times 100\%$	Kantor Energi Dan Sumber Daya Mineral

- MISI 3 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI
- TUJUAN 3.1. : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi, Kualitas Kelembagaan Umkm Koperasi Dan Pengembangan Wisata Daerah Serta Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Daerah, Industri Perdagangan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p align="center">Persentase Pertumbuhan Ekonomi</p> $G = \frac{(PNriil1 - PNriil0)}{PNriil0} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. G = tingkat pertumbuhan ekonomi 2. PNriil1 = pendapatan kabupaten untuk tahun dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung. 3. PNriil0 = pendapatan kabupaten pada tahun berikutnya
<p align="center">PDRB per kapita</p> $PDRB \text{ Perkapita}_t = \frac{PDRB_t}{\text{Jumlah Penduduk}_t}$ <p>Dimana:</p> <p>PDRB per kapita menghitung membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun.</p> <p>Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah</p>

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
3.1.1. Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	3.1.1.1. Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	$\frac{\text{KSP/USP Koperasi Sehat}}{\text{KSP/USP Koperasi aktif}} \times 100\%$ Berdasarkan PP No. 09/1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh Koperasi dan Permeneq No.19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usp Oleh Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	3.1.1.2. Persentase pertumbuhan UMKM	$= \frac{\Sigma \text{UMKM thn sekarang} - \text{Jml UMKM thn lalu}}{\Sigma \text{UMKM thn lalu}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.1.2. Meningkatnya kunjungan wisata, yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata	3.1.2.1. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$= \frac{\text{Target PAD tahun berkenaan} - \text{Target PAD tahun sebelumnya}}{\text{Target PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
	3.1.2.2. Persentase jumlah kunjungan wisatawan	$= \frac{\Sigma \text{pengunjung tahun berkenaan} - \text{Jumlah pengunjung tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{pengunjung tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
3.1.3. Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	3.1.3.1. Jumlah nilai investasi penanaman modal	Jumlah nilai PMDN tahun berkenaan	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
	3.1.3.2. Jumlah investor	Jumlah investor tahun berkenaan	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
3.1.4. Meningkatnya kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar	3.1.4.1. Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	Data Stastitik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	3.1.4.2. Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Data Stastitik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

TUJUAN 3.2. : Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p align="center">Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)</p> <p>- Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan</p> <p>Skor PPH :</p> $(\%)AKG = \frac{\text{Energi masing} - \text{masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Penjelasan :

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
3.2.1. Meningkatnya nilai tambah, hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan)	3.2.1.1. Jumlah produksi tanaman pangan	Jumlah Produksi Tanaman pada areal yang di panen (ton)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	3.2.1.2. Jumlah produktivitas tanaman pangan	Jumlah Produksi Tanaman yang dipanen per hektar (ton/ha)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	3.2.1.3. Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Ternak	- Jumlah populasi ternak (ekor) - Jumlah produksi ternak (kg)	Dinas Peternakan
	3.2.1.4. Peningkatan produksi hasil perkebunan (ton)	- Jumlah Produksi komoditi - Mengukur perkembangan produksi tanaman perkebunan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
	3.2.1.5. Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$= \frac{\text{Luas hutan rakyat yang direhabilitasi}}{\Sigma \text{ luas hutan rakyat}} \times 100\%$	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
3.2.2. Meningkatnya manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan	3.2.2.1. Jumlah hasil perikanan tangkap dan budidaya	- Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berkenaan - Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berkenaan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3.2.2.2. Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan tahun berkenaan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.2.3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	3.2.3.1. Persentase kualitas gizi pangan daerah	Prosentase rata-rata jumlah dan kualitas yang tersedia di wilayah berdasar pada kebutuhan gizi aktual pada tahun berjalan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	3.2.3.2. Persentase daerah rawan gizi	$= \frac{\Sigma \text{ desa rawan pangan pada tahun berkenaan}}{\Sigma \text{ desa}} \times 100\%$	Dinas Pertanian Tanaman Pangan

MISI 4 : MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 TUJUAN 4.1. : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p>Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</p> $\frac{\text{Jumlah Usulan Desa dan Kecamatan yang Terakomodir di Dokumen Perencanaan}}{\text{Jumlah Total Usulan Perencanaan Daerah}} \times 100 \%$

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
4.1.1. Meningkatnya Perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	4.1.1.1. Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	$\frac{\Sigma \text{ usulan yang masuk APBD}}{\Sigma \text{ usulan Musrembang}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
4.1.2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	4.1.2.1. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	$\frac{\Sigma \text{ kegiatan RKPD yg diakomodir di APBD}}{\Sigma \text{ kegiatan RKPD}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
4.1.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	4.1.3.1. Jumlah desa sejahtera	Jumlah Desa yang Diintervensi dalam Pembangunan Desa Mandiri (Sejahtera)	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana
	4.1.3.2. Persentase desa yang tertib administrasi	$\frac{\Sigma \text{ Desa yang menyampaikan Laporan (RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LPD)}}{\Sigma \text{ Desa se Kabupaten Sumenep}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana

TUJUAN 4.2. : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{9} = 0,11$

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
4.2.1. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa	4.2.1.1. Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	Jumlah Pengunjung website instansi pemerintah daerah tahun berkenaan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4.2.2. Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan dan kualitas layanan kependudukan	4.2.2.1. Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang ber KTP}}{\Sigma \text{Wajib KTP}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

TUJUAN 4.3. : Mewujudkan Kultur Dan Tata Pemerintahan Yang Tertib Dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p style="text-align: center;">Nilai Opini BPK</p> <p>Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Negara oleh BPK Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilar Pelaporan Fiskal • Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran • Pilar Analisis dan Menejemen Resiko Fiskal • Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
4.3.1. Terwujudnya disiplin tata kelola pemerintahan yang baik dan tersedianya aparatur yang memadai, kompeten, bersih dan akuntabel	4.3.1.1. Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	$\frac{\Sigma \text{pejabat struktural yg sesuai persyaratan kepangkatan}}{\Sigma \text{pejabat struktural}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	4.3.1.2. Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	$\frac{\Sigma \text{jabatan struktural terisi}}{\Sigma \text{jabatan sesuai SOTK}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	4.3.1.3. Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	$\frac{\Sigma \text{kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Pegawai ASN}} \times 100\%$	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	4.3.1.4. Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur (Predikat EKPPD)	Hasil Evaluasi KPPD oleh Kementerian Dalam Negeri Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otda Setda
	4.3.1.5. Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian PAN & RB. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Bagian Organisasi Setda
4.3.2. Meningkatnya pelayanan fungsi legislatif	4.3.2.1. Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan	Jumlah rapat paripurna yang diterbitkan risalah rapat	Sekretariat DPRD
	4.3.2.2. Jumlah naskah produk hukum Daerah	Jumlah Naskah Raperda, Peraturan DPRD serta Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang disediakan.	Sekretariat DPRD
4.3.3. Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan auditable	4.3.3.1. Persentase pertumbuhan PAD	$= \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
	4.3.3.2. Persentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat	$= \frac{\text{Tanah yang bersertifikat}}{\text{Total Tanah milik daerah}} \times 100\%$	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
	4.3.3.3. Persentase Belanja modal terhadap total belanja	$= \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
	4.3.3.4. Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	$= \frac{\sum \text{tindaklanjut Rekomendasi LHP BPK}}{\sum \text{Rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%$	Inspektorat
	4.3.3.5. Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	$= \frac{\sum \text{tindaklanjut Rekomendasi LHP Inspektorat}}{\sum \text{Rekomendasi LHP Inspektorat}} \times 100\%$	Inspektorat

MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS NILAI-NILAI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TUJUAN 5.1. : Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p>Persentase Jumlah Konflik</p> $P = \frac{F}{N} \times 100\%$
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P : Persentase • F : jumlah penanganan kasus konflik social • N : Jumlah demo yang ditangani

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
5.1.1. Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	5.1.1.1. Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	$\frac{\Sigma \text{konflik sosial yang ditangani}}{\Sigma \text{konflik sosial seluruhnya}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	5.1.1.2. Jumlah demo	Jumlah demo yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
5.1.2. Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat (terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif)	5.1.2.1. Angka Kriminalitas	Jumlah kasus pelanggaran pidana tahun berkenan	Satuan Polisi Pamong Praja
	5.1.2.2. Persentase Penegakan Perda	$\frac{\Sigma \text{pelanggaran terhadap Perda yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku}}{\Sigma \text{pelanggaran terhadap Perda}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja
	5.1.2.3. Persentase Pelanggaran K3	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku}}{\Sigma \text{pelanggaran K3}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	5.1.2.4. Persentase penanganan daerah rawan bencana	$\frac{\Sigma \text{ daerah rawan bencana yang ditangani}}{\Sigma \text{ daerah rawan bencana di Kab. Sumenep}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5.1.2.5. Jumlah Korban Bencana	Jumlah korban bencana tahun berjalan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5.1.2.6. Jumlah korban Bencana yang tertangani	$\frac{\Sigma \text{ korban bencana yang ditangani}}{\Sigma \text{ korban bencana tahun berjalan}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

TUJUAN 6.1. : Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Pemberdayaan Seni, Budaya, Pemuda Dan Olah Raga

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
<p style="text-align: center;">Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep</p> $P = \frac{A1 - A2}{A2} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P : Persentase • A1 : Jml apresiasi seni dan budaya sumenep tahun berkenaan • A2 : Jml apresiasi seni dan budaya sumenep tahun sebelumnya

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
6.1.1. Menguatnya/ terpeliharanya seni dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep	6.1.1.1. Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan	Jumlah apresiasi seni dan budaya Sumenep tahun berkenaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
6.1.2. Meningkatnya kualitas peranan pemuda dan prestasi olahraga di	6.1.2.1. Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda yang berprestasi}}{\Sigma \text{ Pemuda yang dibina}} \times 100 \%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga

SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
Kabupaten Sumenep	6.1.2.2. Persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	$\frac{\Sigma \text{Atlet cabang olahraga yang berprestasi}}{\Sigma \text{atlet cabang olahraga}} \times 100 \%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga



BUPATI SUMENEP
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si